Penataan Ruang dan Penatagunaan tanah

Penataan ruang berkaitan erat dengan penatagunaan tanah

Dalam upaya penatagunaan tanah diperlukan perencanaan

Dasar Hukum Penatagunaan Tanah

- a. Psl 2, 14 dan 15 UUPA
- b. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dan Fungsi RTGT

- Tujuan RTGT Untuk mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang LOSS (lestari, Optimal, Serasi, Seimbang)
- Fungsi RTGT dalam rencana pembangunan
- Sebagai prosedur penyediaan tanah
- Sebagai pengarahan kegiatan penggunaan tanah (jangka pendek dan jangka panjang)

Dasar-dasar pemikiran (falsafah) penyusunan RTGT

- Penggunaan tanah bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyrakat yang menggunakan tanah
- Disadari bahwa tanah yang menjadi objek perencanaan sebagian besar telah dilekati bermacam-macam hak (berkaitan dengan pembebasan hak)
- Didahului oleh kegiatan yang akan dilakukan/dikerjakan yakni melakukan survei baru kemudian alokasi tanahnya
- Berdasarkan pola pikir bahwa ruang daratan identik dengan tanah (Pasal 4 UUPA)

Penataan Ruang dan Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018)

Dasar Reforma Agraria:

Pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tujuan Reforma Agraria:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. Menciptakan menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan RTGT berpegang pada hal-hal berikut:

- Politik
- Hukum
- Organisatoir
- **teknis**

Peranan Pemda dalam penyusunan RTGT

- Pasal 14 UUPA secara tegas menunjuk Pemda sebagai pelaksana penyusunan RTGT
- RTGT yang disusun Pemda mempunyai fungsi memberikan arah penggunaan tanah serta sebagai sarana untuk mengoordinasi semua kegiatan pembangunan di daerah
- Koordinasi penyusunan RTGT dilakukan oleh BAPPEDA selaku aparat pemerintah wilayah yang mengoordiansi pelaksanaan pembagunan di daerah
- RTGT yang disusun harus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan di daerah sepanjang menyangkut penetapan lokasi dan kebutuhan tanah, yang mencakup rencana jangka pendek lima tahun dan rencana tahunan

Hierarki RTGT

Hierarki RTGT mempunyai tingkatantingkatan berdasarkan cakupan waktu dan wilayah administrasi pemerintah.

Semakin sempit cakupan wilayah perencanaan dan semakin pendek jangka waktunya, akan memiliki tingkat detail yang semakin tinggi.

Berdasarkan cakupan wilayah administrasi

- Hierarki RTGT terbagi dalam :
- a. RTGT tingkat nasional
- b. RTGT tingkat provinsi
- c. RTGT tingkat kabupaten
- d. RTGT tingkat khusus atau kecamatan

Berdasarkan cakupan jangka waktu

- Hierarki RTGT terbagi dalam:
- a. RTGT jangka panjang
- b. RTGT jangka menengah
- c. RTGT jangka pendek